

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Desa Batubintang**

###### **a. Sejarah**

Sejarah Desa Batubintang memang belum pasti tercatat filosofinya artinya belum ada peneliti yang secara khusus meneliti tentang sejarah atau latar belakang dari Desa Batubintang, tetapi informasi yang didapatkan tentang filosofi Desa Batubintang adalah di dapat dari lisan masyarakat Batubintang dan profil Desa Batubintang adalah di dapat dari lisan masyarakat Batubintang dan profil Desa Batubintang. Sejarah Desa Batubintang tidak terlepas dari sejarah Masyarakat di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Desa Batubintang merupakan Desa yang dipimpin pertama kali oleh Bapak Mulangsad, Sutaryo, Saleh Subroto, Surawi. AK, Marzuki, SH, Junaidi, H. Syamsul Arifin, PLt. Syamhari, PLt. Moh. Juri, lalu pada pilkades tahun 2015 Ibu Hasbiyah terpilih untuk menjadi pemimpin Pemerintahan Desa Batubintang hingga saat ini.

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa Pada Tahun 2021 jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 12.005 jiwa dari 3.419 rumah tangga. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 6.019 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 5986 jiwa. Suvei Data Sekunder dilakukan oleh Kader Pembangunan Desa, dimaksud sebagai data pembandingan dari data yang ada di Pemerintahan Desa.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Desa Batubintang Tahun 2021**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-Laki	6.019	51.56%
2	Perempuan	5.986	48.44%
<b>Jumlah</b>		<b>12.005</b>	<b>100%</b>

Sumber : data sekunder 'Kecamatan Batumarmar Dalam Angka 2020'

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa Batubintang 12,005 jiwa, terdiri dari laki-laki 6.019 jiwa atau 48,44% dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 5.986 jiwa atau 51,56% dari jumlah penduduk yang tercatat.

Secara geografis Desa Batubintang luasnya adalah 10,05 KM, jarak dari pemerintahan Desa ke pusat pemerintahan kecamatan 2 km sedangkan jarak dari pusat Desa ke Ibukota kabupaten 42km. Geografi wilayah Desa Batubintang meliputi perbatasan Desa :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lesong Daya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa lesong laok dan Bangsereh
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Blaban

#### **b. Pembagian wilayah**

Wilayah Desa Batubintang terdiri dari Empat Belas Dusun yaitu Dusun Tamberu Alet Timur, Dusun Tamberu Alet Barat, Dusun Lompelle Dajah Dusun Lompelle Laok, Dusun Birampak, Dusun Naypenay, Dusun Tenggina Laok, Dusun Tenggina Dajah, Dusun Baban, Dusun Makkol, Dusun Somber, Dusun Somber Tenga, Dusun Panjelin, dan Dusun Tengger Laok, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis

seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Batubintang.

### **c. Agama dan Budaya**

Penduduk Desa Batubintang mayoritas beragama Islam meskipun Desa Batubintang sendiri melihat dari lokasinya dekat dari kawasan pondok pesantren. Namun demikian, masyarakat Desa Batubintang tetap semangat dan hikmat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan seperti pelaksanaan hari-hari besar Islam maupun kegiatan-kegiatan kesenian yang Islami. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Hasbiyah, selaku Kepala Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

“Agamanya kalau disini yang tercatat itu agama Islam semia. Kalau budayanya macam-macam disini, umumnya tu seni dimana terdapat beberapa macam seni yang berbeda-beda seperti seni Oldaol yang biasanya di gelar pas hari-hari penting contohnya ketika malam hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.”<sup>1</sup>

Menurut Ibu Hasbiyah, selaku Kepala Desa Batubintang menyatakan bahwa data yang tercatat di Pemerintah Desa Batubintang terkait agama yang dianut masyarakat yaitu agama Islam. Adapaun budayanya yaitu bermacam-macam dimana di Desa Batubintang sendiri terdapat beberapa seni yang berbeda, mulai dari seni ol-daol, seni tarik suara, dan seni petik laut sehingga Desa Batubintang disebut juga dengan desa seni budaya. Hal ini selaras dengan Bapak Mahfud yang menyatakan:

“agama yang dianut oleh penduduk Desa Batubintang ya agama Islam dan itu sudah ada dan tercatat di dalam dokumen Desa Batubintang. Jadi dari jumlah penduduk yang sebanyak 12.005 orang yang agamanya Islam semua.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hasbiyah, Kepala Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (25 April 2022).

<sup>2</sup> Mahfud, sekretaris Desa Batubintang, *Wawancara Langsung*. (25 April 2022.)

Menurut Bapak Mahfud, selaras dengan paparan Ibu Hasbiyah selaku kepala desa bahwa agama yang dianut oleh penduduk Desa Batubintang yaitu seluruhnya beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dari data yang sudah tercatat di dalam dokumen Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dari tokoh-tokoh tua, bahwa selama ini pola-pola hubungan antar masyarakat masih dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, seperti Nahdatul Ulama (NU).

**Tabel 2.6.**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama  
Desa Batubintang Tahun 2021**

No	Agama	L	P	Jumlah	Presentase(%)
1	Islam	6019	5986	12.005	100%
2	Katholik	–	–	–	–
3	Kristen	–	–	–	–
4	Hindu	–	–	–	–
5	Budha	–	–	–	–

Sumber : Data Sekunder “Kecamatan Batumarmar Dalam Angka 2021”

Selain itu, di Desa Batubintang juga telah dibentuk kelompok-kelompok pengajian seperti pengajian malam mingguan, malam seninan, dan kelompok pengajian lainnya baik kelompok perempuan dan laki-laki serta kesenian bernuansa Islami seperti hadrah yang ada di setiap dusunnya. Untuk pelaksanaannya sendiri bisa dilaksanakan setiap minggu, setengah bulan sekali, bahkan ada yang sebulan sekali dan melibatkan seluruh masyarakat Desa Batubintang.

Jadi, masyarakat Desa Batubintang mayoritas beragama Islam sesuai dengan data yang tercatat dan juga hasil pengamatan lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti dimana terdapat banyak perkumpulan atau kelompok-kelompok pengajian yang terbentuk di Desa Batubintang itu sendiri mulai dari tingkat dusun. Selain itu perayaan hari-hari besar Islami juga diadakan.

Sedangkan perspektif Budaya Masyarakat di Desa Batubintang sangat kental dengan budaya Islam. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua desa di Kabupaten Pamekasan sangat kuat terpengaruh pusat kebudayaan Islam yang tercermin dari keberadaan pondok pesantren yang ada di Pamekasan.

Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang terpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Didalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya Islam sebagai agama mayoritas dianut masyarakat, dalam menjalankannya sangat kental sehingga tradisi budaya ketimuran sendiri berkembang dan banyak dipengaruhi ritual-ritual agama atau kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa peringatan-peringatan keagamaan yang ada dimasyarakat, terutama Agama Islam dipeluk mayoritas masyarakat, dalam menjalankannya muncul kesan-kesan nuansa tradisinya contoh yang bisa kita lihat waktu tahun baru Hijriyah dengan melakukan do'a bersama dimasjid dan mushalla-mushalla.

#### **d. Visi dan Misi**

##### **Visi**

Terwujudnya Desa Batubintang yang maju, damai, tentram, makmur dan sejahtera

## **Misi**

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan cakap ilmu yang ditekuni melalui langkah persertifatif masyarakat
- 2) Memberikan pelayanan publik yang bersih, menyeluruh dan prima
- 3) Menciptakan keamanan desa demi ketertiban lingkungan dan kondusifitas kehidupan masyarakat
- 4) Mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui sanitasi dilingkungan masing-masing
- 5) Melakukan pembangunan infrastruktur desa yang merata untuk mendukung terciptanya peningkatan ekonomi produktif

### **e. Struktur**

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktural kepemimpinan Desa Batubintang tidak bisa lepas dari stuktural administratif pemerintahan pada level diatasnya. Secara administrasif pemerintahan di Desa Batubintang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh arapat desa yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Batumarmar.

Wilayah Desa Batubintang terdiri dari Empat Belas Dusun yaitu Dusun Tamberu Alet Timur, Dusun Tamberu Alet Barat, Dusun Lompelle Dajah Dusun Lompelle Laok, Dusun Birampak, Dusun Naypenay, Dusun Tenggina Laok, Dusun Tenggina Dajah, Dusun Baban, Dusun Makkol, Dusun Somber, Dusun Somber Tenga, Dusun Panjelin, dan Dusun Tengger Laok, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Batubintang.

**Tabel 2.9**  
**Nama Perangkat Pemerintahan**  
**Desa Batubintang**

No	Nama	Jabatan
1	Hasbiyah	Kepala Desa Batubintang
2	Mahfud	Sekretaris Desa
3	Asmuni	Kasi pemerintahan
4	Moh. Ruba'i	Kasi Pelayanan
5	Maskub	Kasi Kesra
6	Abd. Aziz	Kepala Urusan Tata Usaha
7	Arnawati	Kepala Urusan Keuangan
8	Moh. Syafi'i	Kepala Urusan Perencanaan
9	Aspa'i	Kepala Dusun Tamberu Alet Timur
10	Supriyadi	Kepala Dusun Tamberu Alet Barat
11	Moh. Dzikri	Kepala Dusun Lonpelle Dajah
12	Ach Zainuddin	Kepala Dusun Lonpelle Laok
13	Moh. Toheruddin	Kepala Dusun Naypenay
14	Samsu'din	Kepala Dusun Birampak
15	Saymsul Arifin	Kepala Dusun tengginah Dajah
16	Moh. Holil	Kepala Dusun Tengginah Laok
17	Suroso	Kepala Dusun Baban
18	Herman Syahdianto	Kepala Dusun Makkol
19	Moh. Muhksin	Kepala Dusun Sumber
20	Abd. Wasid	Kepala Dusun Sumber Tenga
21	Ahmad Riady	Kepala Dusun panjalin
22	Hasin	Kepala Dusun Tegger Laok

## 2. Data lapangan

### a. Penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan.

Penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di maksud sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverance*). Bahwa prinsip atau *good governance* ialah partisipasi, transparansi, dan kebertanggung jawaban dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan.

Keakuntabilisan keuanagan desa dikelola berdasarkan pedoman pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam

Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

#### 1) Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keuangan desa. Tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dikatakan sangat signifikan. Hal ini sesuai dengan paparan hasil wawancara peneliti dengan informan selaku pemerintah desa:

“Salah satu sumber pendapatan desa itu ada Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) itu bersumber dari APBD, dari Daerah atau Kabupaten. Dan ada juga dari bantuan provinsi, yang dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD). Itu peruntukannya, Alokasi Dana Desa (ADD) itu bebas mulai dari bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, bahkan tak terduga. Yang tak terduga itu seperti adanya covid-19, itu kan masuk ke bagian tak terduga. Jadi untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu seperti pembangunan atau perbaikan Balai Desa.”<sup>3</sup>

Menurut Bapak Mahfud untuk pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan juga dari bantuan provinsi. Adapun dalam penerapannya, Alokasi Dana Desa (ADD) bebas diperuntukkan dalam bidang apa saja seperti bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan, serta dalam bidang tak terduga seperti adanya pandemi covid-19 atau bencana alam lainnya. Hal ini selaras dengan pernyataan Ibu Arnawati selaku Kepala Urusan Keuangan yang sudah peneliti wawancara:

“Sedangkan untuk penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) itu diterapkan di bidang pemerintahan. Selain di bidang pemerintahan juga bisa diterapkan di bidang pembinaan. Untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan bisa juga kalau ADD. Jadi untuk penerapan ADD itu semua bidang bisa.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, *wawancara langsung* (21 Mei 2022).

<sup>4</sup> Asnawati, Kepala Urusan Keuangan Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (21 Mei 2022).

Menurut Ibu Arnawati selaku Kepala Urusan Keuangan bahwa penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat diterapkan pada bidang pemerintahan dan pembinaan. Selain pemerintahan dan pembinaan, Alokasi Dana Desa (ADD) juga dapat diterapkan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan. . Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat desa terkait hal yang sama yaitu penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Berikut hasil wawancara peneliti:

“Penerapan pertanggung jawaban dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa di Desa Batubintang bisa dikatakan baik karena sejauh ini pemerintah desa melakukan musyawarah dengan Kepala Dusun dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Sehingga kami mengetahui bagaimana mekanisme dari perencanaan sampai pengalokasian dana tersebut. Contohnya pengadaan perbaikan jalan plosok, pengadaan posko penanggulangan Covid 19 dan perenovasian beberapa bangunan yang sudah mulai rusak. Pengungkapan anggaran Alokasi Dana Desa misalnya seperti perbaikan jalan pelosok ataupun perenovasian beberapa bangunan di pasang baliho di sekitar proyek supaya masyarakat sekitar tahu berapa biaya yang dikeluarkan.”<sup>5</sup>

Menurut Bapak H. Jufri selaku tokoh di Dusun Tamberu Alet Barat Desa Batubintang. Penerapan akuntabilitas pengelola Alokasi Dana Desa di Desa Batubintang dikatakan cukup baik dalam pelaksanaannya. Karna sebagian dari tokoh tokoh masyarakat di undang untuk mengetahui mekanisme atau memberikan usulan yang mana setiap daerah yang membutuhkan.

## 2) Akuntabel

Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah diterapkan.

---

<sup>5</sup> H. Jufri, salah satu Tokoh di Dusun Tamberu Alet Barat, Desa Batubintang, *Wawancara langsung* (21 Mei 2022).

peneliti menanyakan terkait tahap perencanaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban penerapan Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Berikut adalah hasil wawancara peneliti:

“Di perencanaan itu nanti setelah semuanya di data-data semuanya sudah terkumpul, uang sudah masuk, dan terealisasi semua. Nanti kita akan mengadakan Musyawarah Desa (MusDes) yaitu MusDes perencanaan. Itu diadakan diawal tahun itu.”<sup>6</sup>

Bapak Mahfud mengatakan bahwa dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan dilakukan setelah semua data-datanya terkumpul, baik mulai dari masuknya uang dan juga penerapan yang dilakukan dari pendapatan yang diperoleh oleh desa. Dimana selanjutnya, akan diadakan Musyawarah Desa (MusDes) ketika semua data-data yang diperlukan sudah rampung. Musyawarah Desa (MusDes) ini dinamakan dengan Musyawarah Desa (MusDes) pertanggungjawaban yang biasa dilaksanakan diakhir tahun yaitu dibulan Desember.

“Iya, satu tahun sekali pertanggungjawabannya itu. Kan MusDes perencanaan, terus MusDes pelaksanaan, terus pertanggungjawaban. Ya nanti dilaporkan bahwa sisa dana itu sekian.”<sup>7</sup>

Selanjutnya, Bapak Mahfud juga mengatakan bahwa dalam tahap pelaporan pertanggungjawaban ini dilakukan dalam satu tahun anggaran satu kali dimana ada Musyawarah Desa (MusDes) perencanaan yang dilakukan diawal sebelum adanya realisasi atau penerapan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta ada Musyawarah Desa (MusDes) pertanggungjawaban yang

---

<sup>6</sup> Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (21 Mei 2022).

<sup>7</sup> Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (21 Mei 2022)

dilaksanakan satu tahun anggaran satu kali yaitu diakhir tahun setelah penerapan pelaksanaan APBDes terlaksana.

Peneliti juga menanyakan lebih lanjut terkait dengan tahap pelaporan pertanggungjawaban penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Berikut adalah paparan narasumber yang sudah peneliti wawancarai:

“Pelaporannya itu nanti ke BPD yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD. Selain itu, nanti kita juga laporan ke Bupati. Dimana laporannya itu ada seperti ini laporannya yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2020-2021. Jadi sudah lengkap di PerDeskan nanti dimana PerDesnya ini disini per tanggal 05 Januari. Dan ada laporan realisasi yang isinya juga sama , cuma bedanya kalau yang realisasi itu tidak ada PerDesnya.”<sup>8</sup>

Selanjutnya Bapak Mahfud juga menambahkan bahwa dalam tahap pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan atau penerapan APBDes nantinya akan disampaikan dalam Musyawarah Desa (MusDes) yang akan disampaikan sendiri oleh Kepala Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yaitu Ibu Hasbiyah kepada BPD. Selain kepada BPD, pelaporan pertanggungjawaban juga akan dilaporkan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban dari realisasi atau penerapan pelaksanaan APBDes.

Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Hasin selaku Kadus Tengger laok Desa Batubintang yang menyatakan:

“Untuk pelaporannya sendiri nanti itu ada (MusDes) pertanggungjawaban. Didalam Musyawarah Desa (MusDes) itu nanti melaporkan terkait dari realisasi atau penerapan dari pendapatan-pendapatan desa itu yang digunakan dalam membiayai belanja desa (APBDes).”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (21 Mei 2022).

<sup>9</sup> Hasin, Kepala Dusun Tengger laok, *Wawancara Langsung* (24 Mei 2022).

Menurut Bapak Hasin menyatakan bahwa dalam pelaporan pertanggungjawaban penerapan pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yaitu tetap dengan diadakannya Musyawarah Desa (MusDes) pertanggungjawaban.

Hal ini diperkuat dari observasi yang peneliti lakukan yaitu pada saat peneliti melakukan wawancara di Balai Desa Batubintang dimana sebagian Pemerintah Desa Batubintang melakukan diskusi dalam mempersiapkan hal yang berkaitan dengan pelaporan pertanggungjawaban penerapan Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut merupakan laporan pertanggung jawaban dari pemerintahan desa mengenai realisasi anggaran pendapatan desa.

Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi rrealisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbaiki dengan anggarannya dalam satu periode. Adapaun lapoaran realisasi pelaksanaan anggaran di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan bisa dilihat di lampiran.

### 3) Partisipatif

Asas partisipatif di mulai dari tahap perencanaan, pada tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa masyarakat sudah diikut sertakan melalui MUSDes yang ada di MUSDes tersebut ada perwakilan dari setiap dusun baik itu kepala dusun atau para tokoh-tokoh di dusun tersebut guna untuk menyampaikan pendapat yang telah di musyawarah bersama didusun tersebut. Dalam musyawarah perencanaan APBDes di bahas dan disepakati bersama. Hal ini

sesuai dengan paparan hasil wawancara peneliti dengan informasi selaku pemerintah desa:

“Pemerintahan desa disetiap tahunnya sudah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), tiap dusun itu sudah ada tim, tim itu diantaranya kepala dusun dan tokoh-tokoh masyarakat desa, jadi mau buat apa di dusun tersebut nanti di usulkan”<sup>10</sup>

Aparatur desa di Desa Batubintang mengundang masyarakat melalui undangan tertulis atau lisan yang disampaikan setiap kepala dusun dan tokoh-tokoh masyarakat. Masyarakat yang diundang untuk ikut musyawarah terdiri dari BPD, kepala dusun dan para tokoh-tokoh desa untuk mengikuti musyawarah sehingga bisa menyampaikan inisiatif yang besar untuk ikut terlibat secara langsung. Hal ini sesuai dengan wawancara yang di sampaikan oleh pemerintahan desa:

“Sampai saat ini yang kita undang untuk datang itu pasti datang, jadi kita melihat dari situ dia ikut kegiatan sampai selesai, dalam musyawarah tersebut perwakilan dari setiap dusun sangat aktif dalam menyampaikan pendapat.”<sup>11</sup>

Manurut Bapak Mahfud dalam musyawarah desa, masyarakat aktif mengusulkan beberapa kegiatan, kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat akan di prioritaskan, kegiatan mana yang lebih mendesak akan diakomodir terlebih dahulu. Hal ini selaras dengan Bapak Jufri selaku salah satu tokoh di Desa Batubintang:

“Kalo saya membawa setiap usulan yang kemudian di ajukan agar pemerintahan desa mengetahui apa saja yang kebutuhan masyarakat sehingga pemerintahan desa mengetahui, contohnya waktu kemeren pas

---

<sup>10</sup> Hasbiyah, Kepala Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* ( 21 Mei 2022)

<sup>11</sup> Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (21 Mei 2022)

marak-maraknya covid-19 masyarakat kan banyak kebutuhannya seperti masker, vitamin, dan pos penanggulangan covid-19.”<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaan program desa, masyarakat sudah dilibatkan dan ikut serta mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban sehingga masyarakat merasa sangat berpartisipasi untuk kelancaran dan kemajuan desa. Hal ini sesuai dengan paparan dari masyarakat Desa Batubintang sebagai berikut:

“Dalam penrapan ADD keterlibatan masyarakat di Desa Batu Bintang menjadi salah satu hal yang dianggap penting, terbukti ketika perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi masyarakat dilibatkan dalam bentuk MusDes sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam ADD.”<sup>13</sup>

Menurut Bapak Yasin selaku masyarakat Desa Batubintang memaparkan bahwa dalam pengelolaan ADD masyarakat dilibatkan sehingga masyarakat mengetahui bagaimana mekanisme penerapan ADD tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan maka penerapan partisipatif menunjukkan bahwa penerapan partisipatif yang telah dilakukan pada tahap penerapan ADD yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan indikator partisipatif menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam Muttiarni dkk (2020). Pertama, pada tahap perencanaan pemerintah desa di Desa Batubintang telah mengajak masyarakat dalam Musdes, Musdus, dan Muscap. Dalam Musdes pemerintah desa mengundang tokoh masyarakat, BPD, dan aparatur pemerintah desa untuk mendiskusikan dan menetapkan rencana peraturan desa tentang APBDes.

---

<sup>12</sup> H. Jufri, salah satu Tokoh di Dusun Tamberu Alet Barat, Desa Batubintang, *Wawancara langsung* (21 Mei 2022).

<sup>13</sup> Yasin, Masyarakat Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (22 Mei 2022).

Hal ini diperkuat dari observasi yang peneliti lakukan yaitu pada saat peneliti melakukan wawancara di Balai Desa Batubintang dimana Pemerintah Desa Batubintang melakukan diskusi dengan Masyarakat desa dan para tokoh masyarakat dalam mempersiapkan hal yang berkaitan dengan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dari paparan data narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap partisipatif juga akan diadakan Musyawarah Desa yang dikenal dengan MusDes, dimana MusDes ini akan dilakukan jika data-data yang dibutuhkan mulai dari usulan dan inovatif masyarakat desa.

**b. Penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.**

1) Infasrtuktur

Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan dilaksanakan pada saat dana telah dicairkan. Hal ini seperti yang di paparkan oleh Ibu hasbiyah ketika di Wawancara oleh peneliti:

“Pelaksanaan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan ketika dananya sudah ada atau sudah dicairkan, dan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di bidang pemerintahan untuk kesejahteraan desa termasuk operasional pemerintahan, termasuk pembinaan juga disitu masuk atau dapat dibiayai melalui pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) itu. Selain itu, seperti pembangunan Balai Desa dan tempat-tempat ibadah itu juga masuk dari penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) atau istilah lainnya juga bisa dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Akan tetapi, kalau ada yang lebih prioritas itu yang dilaksanakan terlebih dahulu, seperti jalan pedalam dll.”<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hasbiyah, Kepala Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (22 Mei 2022)

Menurut Ibu Hasbiyah dalam pelaksanaan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dapat diterapkan dalam segala bidang kegiatan desa mulai dari bidanag pemerintahaan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan.

Selain itu, peneliti juga menanyakan terkait dengan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangun dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikut paparan informan terkait penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangun dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu:

“Setiap tahunnya meningkat tergantung dari kegiatannya juga, dan jatah kan sekarang setiap perangkat desa itu kan naik, otomatis kan meningkat. Selain itu juga, kegiatannya kan meningkat dan lebih banyak lagi.”<sup>15</sup>

Menurut Bapak Mahfud memaparkan bahwa dalam penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangun dan pemberdayaan masyarakat desa sudah meningkat tiap tahunnya. Hal ini juga tergantung dari kegiatan-kegiatan serta peningkatan jatah yang dapat dibiayai oleh pendapatan desa yang bersumbe dari Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Hasin selaku pemerintah Desa Batubintang yaitu:

“Untuk penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) disini ya kalau ditanya soal peningkatan ya meningkat. Contoh ADD ini kan dapat diterapkan disemua bidang kan seperti di pembangunan bisa, pembinaan, dan yang lainnya juga bisa. Jadi melihat dari kegiatan dibidang pemerintahan sendiri mengalami peningkatan dan bisa dilihat di APBDes.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (21 Mei 2022)

<sup>16</sup> Hasin, Kadus Tengger laok Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (24 Mei 2022).

Menurut Bapak Hasin selaku Pemerintah Desa Batubintang juga memaparkan bahwa dalam penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang mengalami peningkatan dibidang pemerintahan dimana untuk penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat diterapkan pada segala bidang kegiatan-kegiatan desa seperti halnya dalam pembangunan dan pemberdayaan yang bersumber dari ADD. Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat desa terkait hal yang sama. Berikut hasil wawancara peneliti:

“Peningkatannya sendiri menurut saya meningkat, seperti kegiatan poskamling, lalu di Balai Desa itu sekarang sudah bagus tempatnya. Jadi misal mau mengadakan acara Desa Siaga atau kegiatan lainnya misal penyuluhan dan lain-lain sudah enak sekarang.”<sup>17</sup>

Menurut Ibu Sitti Maimuna, mengatakan bahwa terjadi peningkatan meskipun tidak mengetahui sumber dana dari peningkatan kegiatan belanja desa itu sendiri apakah bersumber dari PADes, DD, ataupun ADD. Ibu Sitti Maimuna mengatakan bahwa terjadi peningkatan pada kegiatan poskamling serta perbaikan Balai Desa sehingga Balai Desa dapat digunakan oleh masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan desa. Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat desa terkait dampak ADD terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Batubintang.

“Ya dampaknya kalau menurut saya ya banyak, jadi masyarakat itu bisa menikmati hasil pembangunan. Kalau dulu sebelum ada dana desa, kita itu untuk mengangkut, salah satu aja ya di bidang pertanian itu dulu sebelum jalan masuk ke persawahan, masyarakat mengangkut padi itu masih dipikul dipundaknya. Akan tetapi sekarang, dekat sudah kan, mobil sudah bisa masuk sekarang. Jadi, untuk perekonomian itu banyak dampaknya”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sitti Maimuna, Masyarakat Batubintang, *Wawancara Lansung* (24 Mei 2022).

<sup>18</sup> Punisa Masyarakat Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (23 Mei 2022).

Ibu punisa juga mengatakan bahwa selain berdampak pada Desa Batubintangitu sendiri, penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Batubintang juga berdampak pada masyarakat desa. Dimana masyarakat desa dapat merasakan hasil dari adanya belanja desa baik dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, bidang pemberdayaan, maupun bidang tak terduga yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa dan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa kedepan seperti kemudahan akses jalan menuju persawahan serta peningkatan perekonomian masyarakat desa. Peneliti juga menanyakan kepada masyarakat yang lain terkait dampak pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Batubintang:

“Dampak yang dirasakan ya yang saya rasakan dampaknya baik, jelas ya kan sudah ada buktinya seperti pembangunan desa yang paling dirasakan itu. Contoh seperti pembangunan jalan, irigasi, gorong-gorong, penerangan jalan, dan lain-lain. Seperti yang di jurang itu juga, itu kan dananya selama satu periode. Kegiatan desa ya masyarakat ikut, tetapi memang tidak semuanya. Ya banyak kegiatan desa Siaga, kerja bakti, dan lain-lain itu saya mengikuti. Dan untuk dananya sendiri saya kurang tau, rinciannya ya saya kurang tau seperti pembangunan jalan itu biasanya dicantumkan ada kayak keramiknya menghabiskan dana sekian. Tetapi untuk rinciannya itu biasanya ada dibalai desa.”<sup>19</sup>

Menurut Bapak Ahmad, adanya penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki dampak yang baik terlebih penerapan dalam hal pembangunan. Bapak Ahmad mengatakan bahwa dalam hal pembangunan masyarakat desa lebih merasakan dari adanya belanja desa. Dalam kegiatan- kegiatan desa, masyarakat ikut serta meski tidak pada setiap kegiatan. Adapun untuk dana yang digunakan

---

<sup>19</sup> Ahmad, Masyarakat Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (23 Mei 2022).

dalam kegiatan belanja desa seperti pembangunan atau perbaikan jalan Bapak Ahmad mengatakan sudah dicantumkan dalam bentuk coran keramik. Adapun untuk rinciannya Bapak Ahmad mengatakan bahwa hal tersebut dicantumkan di Balai Desa Batubintang. Selain itu peneliti juga menanyakan terkait hal yang sama kepada masyarakat desa lainnya terkait dampak penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan:

“Dampaknya ya kalau dari segi pembangunan sangat dirasakan seperti perbaikan jalan. Terus dipemberdayakan juga seperti ada kegiatan-kegiatan desa dalam pembangunan itu kami di panggil untuk kerja sehingga kami bisa merasakan pemberdayaan tersebut, karna setiap ada pembangunan, kuli nya itu tidak ngambil dari luar desa masudnya masyarakat sini yang jadi kuli dek, jadi untuk pemerintah desa hari ini saya merasakan kinerjanya sangat bagus.”<sup>20</sup>

Menurut Bapak Moh Baidawi menyatakan bahwa dampak yang dirasakan dari segi pembangunan dan pemberdayaan sangat dirasakan oleh masyarakat desa khususnya dibidang pemberdayaan melihat sejauh ini setiap ada kegiatan pembangunan yang selalu melibatkan masyarakat dalam pembangunan tersebut sehingga dampak baik terhadap masyarakat dalam membantu tambahan pendapatan bagi masyarakat desa di Desa Batubintang.

## 2) Posko Penanggulangan Covid-19

Di Desa Batubintang membangun beberapa posko penanggulangan Covid-19 dan petugasnya adalah masyarakat setempat. Lebih lanjut peneliti menanyakan terkait dampak penerapan pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat terkait posko penanggulangan Covid-19. Berikut hasil wawancara peneliti:

---

<sup>20</sup> Moh Baidawi, Masyarakat Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (23 Mei 2022).

“Alat pelindung diri seperti masker, ada pembagian masker gratis dari Balai Desa perangkat desa yang memberikan. Untuk peningkatan kegiatan itu di tahun 2021 Batubintang untuk kegiatan-kegiatannya ya begitu-begitu saja ya mungkin karena covid jadi kegiatan desa dibatasi. Tapi kalau bantuan seperti pembagian beras itu rutin sehingga saya merasakan pemberdayaannya mas.”<sup>21</sup>

Menurut Ibu Lailatul Fitriyah selaku masyarakat desa mengatakan bahwa untuk pemberdayaan terhadap masyarakat sangat dampak seperti pemberian alat pelindung diri berupa pembagian masker sudah dilakukan oleh pemerintah desa langsung dengan melakukan kunjungan langsung ke kediaman masyarakat desa. Adapun dalam peningkatannya sendiri Ibu Lela mengatakan bahwa tidak terjadi peningkatan kegiatan desa di tahun 2021 dikarenakan kegiatan desa yang dibatasi. Meski begitu tahap pemberian bantuan seperti pembagian beras rutin dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Lebih lanjut peneliti menanyakan tentang jumlah posko penanggulangan Covid-19 terhadap aparatur desa. Sesuai hasil wawancara berikut ini:

“Dalam pembangunan posko penanggulangan Covid-19 disesuaikan dengan jumlah dusun yang ada di Desa Batubintang. Jumlah dusun yang ada di Desa Batubintang ada empat belas (14) sehingga jumlah posko penanggulangan Covid-19 berjumlah empat belas (14) juga. Hal ini di maksudkan agar mempermudah dalam berintraksi antara masyarakat dengan petugas posko penanggulangan Covid-19 di masing-masing Dusun.”<sup>22</sup>

Menurut Bapak Moh, Ruba’i selaku Kasi Pelayanan Desa Batubintang mengatakan bahwa sejak adanya Covid-19 sebagian Alokasi Dana Desa di salurkan ke pembangunan posko penanggulangan Covid-19.

---

<sup>21</sup> Lailatul Fitriyah, Masyarakat Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (22 Mei 2022).

<sup>22</sup> Moh, Ruba’i, Kasi Pelayanan Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (23 Mei 2022).

Hal ini diperkuat dari observasi yang dilakukan yaitu dengan adanya fasilitas posko penanggulangan Covid-19 yang lebih baik sehingga dapat dipergunakan secara efektif dalam menanggulangi Covid-19 dan mempermudah interaksi dengan masyarakat seperti pembagian masker, pengecekan suhu tubuh dan lain-lain. Serta memberikan rasa nyaman baik bagi pemerintahan desa maupun masyarakat dalam menggunakan posko penanggulangan Covid-19.

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkan sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.
  - a. Transparansi. Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan aparatur desa terhadap masyarakat dalam penerapan ADD.
  - b. Akuntabel. Akuntabel yang dimaksud adalah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam penerapan ADD
  - c. Partisipatif. Partisipatif yang dimaksud adalah dalam penerapan ADD masyarakat juga ikut andil dalam perencanaan sampai evaluasi berdasarkan MusDes.
2. Penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan

- a. Infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud adalah pembangunan jalan, perbaikan balai dan pembuatan selokan.
- b. Penanggulangan posko Covid-19. Penanggulangan posko Covid-19 yang dimaksud untuk mempermudah intraksi masyarakat dengan petugas terkait penanggulangan Covid-19.

### **C. Pembahasan**

Dari beberapa data yang peneliti temukan, berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka ada beberapa poin yang perlu dibahas oleh peneliti sebagaimana yang akan dijelaskan berikut:

#### **1. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan.**

##### **a. Trasparansi.**

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keuangan desa. Salah satu sumber pendapatan desa itu ada Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) itu bersumber dari APBD, dari Daerah atau Kabupaten. Dan ada juga dari bantuan provinsi, yang dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD). Itu peruntukannya, Alokasi Dana Desa (ADD) itu bebas mulai dari bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, bahkan tak terduga. Yang tak terduga itu seperti adanya covid-19, itu kan masuk kebagian tidak terduga. Jadi untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu seperti pembangunan atau perbaikan Balai Desa.

Penerapan pertanggung jawaban dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa di Desa Batubintang bisa dikatakan baik karena sejauh ini pemerintah desa melakukan musyawarah dengan Kepala Dusun dan beberapa tokoh-tokoh

masyarakat lainnya. Sehingga kami mengetahui bagaimana mekanisme dari perencanaan sampai pengalokasian dana tersebut. Contohnya pengadaan perbaikan jalan plosok, pengadaan posko penanggulangan Covid 19 dan perenovasian beberapa bangunan yang sudah mulai rusak. Alokasi Dana Desa di Desa Batubintang dikatakan cukup baik dalam pelaksanaannya. Karna sebagian dari tokoh tokoh masyarakat di undang untuk mengetahui mekanisme atau memberikan usulan yang mana setiap daerah yang membutuhkan.

**b. Akuntabel.**

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah diterapkan. Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan dilakukan setelah semua data-datanya terkumpul, baik mulai dari masuknya uang dan juga penerapan yang dilakukan dari pendapatan yang diperoleh oleh desa. Dimana selanjutnya, akan diadakan Musyawarah Desa (MusDes) ketika semua data-data yang diperlukan sudah rampung. Musyawarah Desa (MusDes) ini dinamakan dengan Musyawarah Desa (MusDes) pertanggungjawaban yang biasa dilaksanakan diakhir tahun yaitu dibulan Desember.

Dalam tahap pelaporan pertanggungjawaban ini dilakukan dalam satu tahun anggaran satu kali dimana ada Musyawarah Desa (MusDes) perencanaan yang dilakukan diawal sebelum adanya realisasi atau penerapan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta ada Musyawarah Desa (MusDes)

pertanggungjawaban yang dilaksanakan satu tahun anggaran satu kali yaitu diakhir tahun setelah penerapan pelaksanaan APBDes terlaksana.

Selanjutnya pelaporan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang dilanjutkan ke Bupati. Dimana laporan itu berisi pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2020-2021. Tahapan pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan atau penerapan APBDes nantinya akan disampaikan dalam Musyawarah Desa (MusDes) yang akan disampaikan sendiri oleh Kepala Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yaitu Ibu Hasbiyah kepada badan pengawas desa (BPD). Selain kepada BPD, pelaporan pertanggungjawaban juga akan dilaporkan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban dari realisasi atau penerapan pelaksanaan APBDes.

### c. Partisipatif.

Pada tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa masyarakat sudah diikut sertakan melalui MusDes yang ada di MUSDes tersebut ada perwakilan dari setiap dusun baik itu kepala dusun atau para tokoh-tokoh di dusun tersebut guna untuk menyampaikan pendapat yang telah di musyawarah bersama didusun tersebut. Dalam musyawarah perencanaan APBDes di bahas dan disepakati bersama.

Aparatur desa di Desa Batubintang mengundang masyarakat melalui undangan tertulis atau lisan yang disampaikan setiap kepala dusun dan tokoh-tokoh masyarakat. Masyarakat yang diundang untuk ikut musyawarah terdiri dari BPD, kepala dusun dan para tokoh-tokoh desa untuk mengikuti musyawarah sehingga bisa menyampaikan inisiatif yang besar untuk ikut terlibat secara langsung.

Dalam pelaksanaan program desa, masyarakat dilibatkan dan ikut serta mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban sehingga masyarakat merasa sangat berpartisipasi untuk kelancaran dan kemajuan desa. Dalam pengelolaan ADD masyarakat dilibatkan sehingga masyarakat mengetahui bagaimana mekanisme penerapan ADD tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi.

Partisipatis dilakukan pada tahap penerapan ADD yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan indikator partisipatif menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam Muttiarni dkk (2020). Pertama, pada tahap perencanaan pemerintah desa di Desa Batubintang telah mengajak masyarakat dalam Musdes, Musdus, dan Muscap. Dalam Musdes pemerintah desa mengundang tokoh masyarakat, BPD, dan aparatur pemerintah desa untuk mendiskusikan dan menetapkan rencana peraturan desa tentang APBDes.

## **2. Penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

### **dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten pamekasan.**

#### **a. Infrastruktur**

Dalam infrastruktur penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan dilaksanakan pada saat dana telah dicairkan dan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di bidang pemerintahan untuk kesejahteraan desa termasuk operasional pemerintahan, dan pembinaan juga disitu masuk atau dapat dibiayai melalui pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) itu. Selain itu, seperti pembangunan Balai Desa dan tempat-tempat

ibadah itu juga masuk dari penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) atau istilah lainnya juga bisa dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini juga tergantung dari kegiatan-kegiatan serta peningkatan jatah yang dapat dibiayai oleh pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

ADD dapat diterapkan disemua bidang, pembangunan bisa, pembinaan, dan yang lainnya juga bisa. Jadi melihat dari kegiatan dibidang pemerintahan sendiri mengalami peningkatan dan bisa dilihat di APBDes. Peningkatannya AAD di Desa Batubintang, seperti kegiatan poskamling serta perbaikan Balai Desa sehingga Balai Desa dapat digunakan oleh masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan desa. Dampaknya bagi masyarakat itu bisa menikmati hasil pembangunan. salah satunya di bidang pertanian, nelayan. masyarakat desa dapat merasakan hasil dari adanya belanja desa baik dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, bidang pemberdayaan, maupun bidang tak terduga yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa dan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa kedepan seperti kemudahan akses jalan menuju persawahan serta peningkatan perekonomian masyarakat desa.

#### b. Posko Penanggulangan Covid-19

Dalam pembangunan posko penanggulangan covid-19 Desa Batubintang membangun beberapa posko penanggulangan Covid-19 dan petugasnya adalah masyarakat setempat. Terkait dampak penerapan pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat terkait posko penanggunalangan Covid-19 dan pemerintahan desa memberikan beberapa alat pelindung diri pembagian masker gratis dari Balai Desa perangkat desa yang memberikan. Untuk

peningkatan kegiatan itu di tahun 2021 untuk kegiatan yang ada di Desa Batubintang dan kegiatan desa dibatasi oleh pemerintahan desa supaya tidak terjadi penyebaran Covid-19 secara meluas.

Fasilitas posko penanggulangan Covid-19 yang baik sehingga dapat dipergunakan secara efektif dalam menanggulangi Covid-19 dan mempermudah intraksi dengan masyarakat seperti pembagian masker, pengecekan suhu tubuh dan lain-lain. Serta memberikan rasa nyaman baik bagi pemerintahan desa maupun masyarakat dalam menggunakan posko penanggulangan Covid-19.

Dalam adanya posko penanggulan Covid-19 perlu adanya kominikatif dan kolaboratif sebagai bentuk kerja sama dari masyarakat dalam mendorong optimisme pemerintah desa untuk terlepas dari kondisi pandemi sehingga kerjasama antara pemerinrah desa dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mengatasi penyebaran Covid-19 sehingga adanya posko penanggulangan Covid-19 sangat memperdayakan masyarakat di Desa Batubintang tersebut.

Pembangunan posko penanggulangan covid-19 menjadi salah satu alternatif dalam memberdayakan masyarakat Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, dikarenakan semua yang menjadi petugas dalam poskopenanggulan covid -19 di dominasi masyarakat setempat yang disesuaikan dengan dusun dusun yang ada di desa tersebut. Yang menjadai alasan pemberdayaan ini adalah sebagai bentuk kepekaan desa terhadap kebutuhan masyarakat dan mempermudah pemerintah dalam menyalurkan berbagai macam bantuan yang sifatnya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat terkait penanggulangan covid-19.